



Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan *Siyasah Dusturiyah*

Wiwin Saputra¹, Abdur Rahim², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: jaelah144@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-03 Keywords: <i>Implementation;</i> <i>Pancasila;</i> <i>Mahad Al-Zaytun;</i> <i>1945 Constitution;</i> <i>Siyasah Dusturiyah.</i>	This research aims to determine the implementation of the 4th Pancasila Principle in Ma'had Al-Zaytun based on Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution and <i>Siyasah Dusturiyah</i> . The method used in this research is the normative legal research method or also commonly called library research. With primary data sources, Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution, and the book <i>Legal Science in the Knot of Siyasah Dusturiyah</i> (Reflections on the Theory and Practice of Constitutional Law in Indonesia) by Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. and secondary data sources come from journal articles, theses, conferences and books. The results of this research are: (1) The implementation of the 4th Pancasila Principle in Ma'had Al-Zaytun based on Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution is to implement democratic education in schools through direct election of class leaders and Student Presidents. Teachers use discussion and deliberation methods in learning, which through discussion and deliberation can develop democratic character. (2) The implementation of the 4th Pancasila Principle in Ma'had Al-Zaytun Based on <i>Siyasah Dusturiyah</i> is to involve the principles of democracy and <i>at-Tasyawur/as-Shura</i> (deliberation) which are in accordance with Islamic teachings and the existing constitutional system, such as in making decisions so as to create an educational environment that is democratic, fair, and in accordance with Islamic values and the state constitution
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-03 Kata kunci: <i>Penerapan;</i> <i>Pancasila;</i> <i>Mahad Al-Zaytun;</i> <i>UUD 1945;</i> <i>Siyasah Dusturiyah.</i>	Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan <i>Siyasah Dusturiyah</i> . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian perpustakaan (<i>library research</i>). Dengan sumber data primer Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945, dan Buku Ilmu Hukum dalam Simpul <i>Siyasah Dusturiyah</i> (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. serta sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal, skripsi, konferensi, dan buku. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 adalah dengan menerapkan pendidikan berdemokrasi di sekolah melalui pemilihan ketua kelas dan Presiden Pelajar secara langsung. Para guru menggunakan metode diskusi dan <i>musyawarah</i> dalam pembelajaran, yang dengan berdiskusi dan <i>bermusyawarah</i> dapat mengembangkan karakter demokratis. (2) Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan <i>Siyasah Dusturiyah</i> adalah dengan melibatkan prinsip-prinsip demokrasi dan <i>at-Tasyawur/as-Syura</i> (<i>musyawarah</i>) yang sesuai dengan ajaran Islam dan sistem konstitusional yang ada, seperti dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta konstitusi negara.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu nilai yang penting adalah Sila Keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Nilai ini mengandung konsep pemerintahan yang bijaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan (Pratama, 2020).

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memegang peranan penting dalam membentuk identitas bangsa dan negara. Salah satu dari lima Sila dalam Pancasila adalah Sila Keempat, yang menegaskan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila Keempat ini menekankan pentingnya *musyawarah* dan kepemimpinan yang bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan

berbangsa dan bernegara (Solehah, 2019). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang besar, prinsip pelayanan yang adil seharusnya menjadi landasan bagi setiap layanan publik (Khoiron, 2017). Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam yang menghasilkan kader-kader terdidik, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, termasuk Sila Keempat, kepada para santrinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam konteks permusyawaratan perwakilan di Mahad Alzaytun (Putriawati, 2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peran Ma'had Al-Zaytun dalam memperkuat nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia (Samsudin, 2018).

Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi individu yang menjalankan keyakinan Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bijaksana (Mas'ud, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman antara Pancasila dan hukum Islam, khususnya dalam konteks implementasi Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang mungkin juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dalam skripsi ini, kami akan mengkaji bagaimana hukum Islam memengaruhi atau mencerminkan implementasi nilai-nilai dasar Pancasila Sila Keempat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia (Ruba'i, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman antara Pancasila dan hukum Islam, menggali bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila Sila Keempat tercermin dan diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang mungkin juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami bagaimana dua landasan utama, Pancasila dan hukum Islam, berinteraksi dan membentuk nilai-nilai moral dalam masyarakat Indonesia yang beragam (Suyekmo, 2015).

Latar belakang ini memberikan pemahaman awal yang kuat tentang relevansi dan signifikansi penelitian ini dalam menggali interaksi antara Pancasila dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peran Ma'had Al-Zaytun dalam memperkuat nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat. Salah satu dari faktor-faktor tersebut adalah keadilan, yang tidak hanya ditekankan dalam manajemen umum tetapi juga dalam manajemen berbasis Islam (Samsudin, 2018). Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia yang terdiri dari lima sila. Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan," memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Sila Keempat Pancasila menekankan pentingnya demokrasi, keterbukaan, dan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat (Lilik Hidayat, 2017).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam meningkatkan kualitas permusyawaratan perwakilan dalam kehidupan sehari-hari di Ma'had Al-Zaytun. Temuan ini juga dapat memberikan kontribusi dalam konteks pengembangan nilai-nilai kerakyatan dan pembinaan permusyawaratan perwakilan di lembaga Pendidikan Al-Zaytun. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan *Siyasah Dusturiyah*.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian perpustakaan (*library research*). Dengan sumber data primer Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945, dan Buku Ilmu Hukum dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. serta sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal, skripsi, konferensi, dan buku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945

Sila Keempat pada Pancasila berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini mengandung makna

bahwa dalam pemerintahan, rakyat (kerakyatan) harus dipimpin oleh kebijaksanaan yang diperoleh melalui musyawarah dan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng dengan latar belakang lambang ini berwarna merah. Proses pengambilan keputusan yang ideal menurut Sila Keempat adalah melalui permusyawaratan, di mana semua pihak berkumpul dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang bijaksana. Sila Keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan perwakilan rakyat, dengan lambang banteng yang menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan kekuatan dalam kerakyatan. Banteng adalah hewan sosial yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini menggambarkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah atau berdiskusi bersama dalam mengambil keputusan. Banteng yang sering berkumpul melambangkan kekuatan dan kebersamaan yang penting dalam proses musyawarah.

Sila Keempat menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Ini adalah inti dari konsep demokrasi, di mana rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat tidak secara langsung menjalankan semua keputusan tetapi melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan atas nama mereka di lembaga-lembaga pemerintahan. Keputusan-keputusan yang diambil dilakukan melalui proses musyawarah. Musyawarah adalah metode pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi dan kesepakatan bersama. Proses musyawarah ini harus dikendalikan dengan pikiran yang sehat dan logis, artinya, harus berdasarkan pertimbangan yang rasional dan objektif. Keputusan yang diambil harus penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Ini menekankan bahwa keputusan harus dibuat dengan integritas moral dan etika yang tinggi, serta dengan kesadaran akan dampaknya terhadap masyarakat luas. (Sila Keempat Pancasila menekankan pada demokrasi yang berbasis perwakilan dan pengambilan keputusan yang bijaksana melalui musyawarah, dengan akuntabilitas kepada Tuhan dan rakyat (Subri, 2010).

Sila Keempat pada dasarnya mengandung prinsip demokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi mengacu pada pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Proses pengambilan keputusan yang ideal dalam Sila Keempat dilakukan melalui permusyawaratan. Ini berarti bahwa keputusan diambil melalui diskusi dan perundingan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah menekankan pentingnya kerja sama, saling mendengarkan, dan mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum mengambil keputusan akhir.

Sila ini juga menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah mereka yang mampu mengambil keputusan dengan bijak, berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional. Mereka harus memiliki integritas, moralitas, serta tanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya dan kepada Tuhan. Kepemimpinan yang bijaksana adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil melalui musyawarah benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik rakyat. makna Sila Keempat Pancasila adalah menekankan pada sistem demokrasi yang berbasis perwakilan, di mana keputusan diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan diskusi dan kesepakatan bersama, dengan dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Sikap positif merujuk pada perilaku yang konstruktif, optimis, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial dan negara. Sebagai warga negara Indonesia, memiliki sikap positif berarti selalu berusaha untuk mendukung dan memperkuat persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan bersikap positif, diharapkan tercipta suasana persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Persatuan adalah kunci untuk menjaga keutuhan negara, kedamaian menciptakan stabilitas sosial, dan kesejahteraan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara. Pengamalan adalah penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti mengubah pemahaman teoretis tentang Setelah memahami nilai-nilai Pancasila, perilaku yang

sesuai dengan nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, dengan bersikap adil, menghormati hak asasi manusia, gotong royong, dan menjaga kesatuan bangsa. Pancasila menjadi tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Setiap nilai ini memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, sikap positif dan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah fundamental untuk mencapai persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, setiap individu diharapkan untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila tetapi juga menerapkannya dalam tindakan sehari-hari demi kebaikan bersama.

Ma'had Al-Zaytun menerapkan Pancasila Sila Keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ma'had Al-Zaytun memasukkan pendidikan demokrasi sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah, komitmen Ma'had Al-Zaytun untuk mendidik siswa tentang demokrasi melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam kurikulum sekolah.

Ma'had Al-Zaytun menerapkan pendidikan demokrasi di sekolah. Ini berarti bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi diajarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Pendidikan demokrasi bukan hanya kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler, tetapi merupakan bagian dari kurikulum resmi sekolah. Ini berarti bahwa pendidikan demokrasi diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas sekolah. Dengan memasukkan pendidikan demokrasi dalam kurikulum, siswa diharapkan belajar tentang pentingnya demokrasi, bagaimana demokrasi bekerja, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini membantu membentuk karakter siswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan demokratis.

Sila Keempat mengandung prinsip bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan

keputusan. Ini berarti tidak ada diskriminasi atau pengutamaan satu kelompok di atas kelompok lain. Semua warga negara memiliki hak yang setara untuk menyuarakan pendapat dan berperan dalam menentukan arah kebijakan publik. Menghargai pendapat orang lain berarti mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini menunjukkan sikap saling menghormati dan pengakuan atas keberagaman pendapat yang ada di masyarakat. Proses pengambilan keputusan melalui musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Musyawarah adalah diskusi yang melibatkan semua pihak yang terkait, di mana setiap pendapat dipertimbangkan secara adil untuk menemukan solusi terbaik bagi kepentingan bersama.

Sila Keempat Pancasila mencerminkan sikap demokratis, di mana partisipasi, egalitarianisme, dan pengambilan keputusan bersama menjadi nilai-nilai utama. Demokrasi menekankan pentingnya keterlibatan semua warga negara dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, serta menjamin bahwa suara setiap individu dihargai dan dipertimbangkan. Nilai kerakyatan dalam Sila Keempat Pancasila tidak hanya merupakan konsep abstrak, tetapi juga diimplementasikan dalam realitas konkret melalui penghargaan terhadap hak-hak yang sama, penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini adalah inti dari sikap demokratis yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Penerapan Sila Keempat memerlukan kemampuan seseorang untuk benar-benar memahami isi dan makna yang terkandung dalam sila tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang konsep kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan. Seseorang harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang diusung oleh Sila Keempat. Pengetahuan ini meliputi cara kerja demokrasi, pentingnya musyawarah, dan peran perwakilan dalam pengambilan keputusan. Setelah memahami dan mengetahui, seseorang perlu bisa menyimpulkan atau mengambil intisari dari nilai-nilai tersebut untuk diterapkan dalam situasi nyata. Ini melibatkan analisis dan refleksi terhadap bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dalam

konteks kehidupan sehari-hari. Tahap akhir adalah mempraktekkan atau mengamalkan nilai-nilai yang dipahami tersebut. Ini berarti menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan dalam tindakan nyata dan perilaku sehari-hari.

Penerapan Sila Keempat harus diwujudkan dalam tindakan nyata di masyarakat. Ini bukan hanya konsep teoretis, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Sila Keempat merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Sikap ini melibatkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, menghargai hak-hak orang lain, mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain, serta bekerja sama dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Sikap demokratis mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak bersama. Penerapan Sila Keempat Pancasila adalah proses yang melibatkan pemahaman mendalam, pengetahuan, analisis, dan praktik nyata dari nilai-nilai demokrasi. Ini harus ditunjukkan melalui sikap dan tindakan yang mendukung partisipasi, musyawarah, dan perwakilan yang bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat.

Ma'had Al-Zaytun menggunakan metode praktis untuk mengajarkan demokrasi kepada siswa. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan pemilihan ketua kelas dan Presiden Pelajar. Dalam proses ini, siswa diberi kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Pemilihan ini mengajarkan siswa tentang proses demokrasi secara praktis. Siswa belajar tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan, bagaimana memilih kandidat yang tepat, dan pentingnya suara mereka dalam menentukan hasil pemilihan. Ini juga membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab di antara siswa yang dipilih sebagai ketua kelas atau Presiden Pelajar. Melalui pemilihan ketua kelas dan Presiden Pelajar, Ma'had Al-Zaytun memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang cara kerja demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam proses pemilihan. Ini mengajarkan siswa tentang proses demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan.

Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 1 ayat 2

Undang Undang Dasar 1945 adalah dengan menerapkan pendidikan berdemokrasi di sekolah melalui pemilihan ketua kelas dan Presiden Pelajar secara langsung. Para guru menggunakan metode diskusi dan musyawarah dalam pembelajaran, yang dengan berdiskusi dan bermusyawarah dapat mengembangkan karakter demokratis.

B. Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang fokus pada pembahasan hukum dan peraturan negara. Fiqh siyasah sendiri adalah ilmu hukum Islam yang mengatur tentang tata kelola dan administrasi negara. Siyasah Dusturiyah mencakup diskusi mengenai konstitusi, yaitu undang-undang dasar negara, serta sejarah dan proses terbentuknya perundang-undangan dalam suatu negara. Salah satu topik yang dibahas adalah legislasi, yaitu proses dan cara perumusan undang-undang, bagaimana undang-undang dibuat, disahkan, dan diterapkan. Siyasah Dusturiyah juga membahas tentang lembaga-lembaga demokrasi dan syara (hukum agama), yang merupakan pilar penting dalam sistem perundang-undangan. Ini mencakup struktur dan fungsi lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan undang-undang (Lubis, 2019).

Kajian ini juga menelaah konsep negara hukum dalam perspektif siyasah, yang berarti negara di mana hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Siyasah Dusturiyah membahas hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara serta tanggung jawab warga negara terhadap pemerintah (Rasli, et.al, 2022).

Istilah syura (dalam bahasa Arab) atau musyawarah (dalam bahasa Indonesia) secara tradisional merujuk pada proses konsultasi dan diskusi bersama untuk mencapai keputusan. Ini adalah konsep yang sangat dihargai dalam budaya dan praktik politik, terutama dalam konteks Islam. Penafsiran terhadap konsep ini tidak statis, melainkan berkembang seiring waktu. Pemahaman dan persepsi mengenai musyawarah mengalami evolusi, mencerminkan perubahan dalam cara

berpikir serta perkembangan sosial dan politik. Dengan berkembangnya pemikiran dan teori politik, konsep musyawarah juga mengalami reinterpretasi. Para pemikir dan pemimpin mencoba menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan dan tantangan modern. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh konteks geografis dan historis. Setiap era dan wilayah mungkin memiliki cara berbeda dalam mengaplikasikan dan memahami konsep musyawarah. Musyawarah dalam Konteks Politik Modern dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sistem Republik: Dalam sistem republik, musyawarah diartikan sebagai partisipasi warga negara dalam pemerintahan melalui pemilihan wakil-wakil mereka.
2. Demokrasi: Musyawarah dikaitkan dengan demokrasi, di mana proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif dari rakyat. Ini adalah dasar dari pemerintahan yang dijalankan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat".
3. Parlemen dan Sistem Perwakilan: Konsep musyawarah diterapkan dalam sistem parlemen dan sistem perwakilan, di mana wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat berdiskusi dan membuat keputusan atas nama rakyat.
4. Senat dan Formatur: Di beberapa negara, senat dan formatur juga merupakan bagian dari sistem yang memungkinkan proses musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan (Raharjo, 1996).
5. Konsep Pemerintahan Modern: Musyawarah modern mencakup berbagai konsep yang mengutamakan partisipasi dan konsultasi publik, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak rakyat (Djazuli, 2003)

Konsep syura atau musyawarah telah berevolusi dan diadaptasi dalam berbagai sistem politik modern. Ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai dasar musyawarah tetap dihargai, cara penerapannya dapat berubah sesuai dengan perkembangan pemikiran, konteks sosial, dan tantangan zaman. konsep syura atau musyawarah menciptakan hubungan timbal balik yang inklusif dan partisipatif antara berbagai pihak dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan komunikasi dua arah dan konsultasi, sehingga keputusan yang diambil lebih demokratis dan

mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

konsep syura atau musyawarah yang baik, diperlukan sikap-sikap seperti kelapangan dada, kerendahan hati, dan keterbukaan. Kelapangan dada mengacu pada sikap menerima dan mendengarkan berbagai pandangan dan pendapat dengan hati yang terbuka. Ini berarti tidak cepat menolak atau menentang pendapat orang lain, tetapi bersedia mempertimbangkannya secara adil. Dalam musyawarah, kelapangan dada penting untuk menciptakan lingkungan di mana semua peserta merasa dihargai dan didengarkan. Ini memungkinkan diskusi yang konstruktif dan inklusif. Kerendahan hati berarti tidak merasa diri lebih baik atau lebih benar daripada orang lain. Sikap ini mencakup kesediaan untuk mengakui bahwa orang lain mungkin memiliki pandangan atau pengetahuan yang berharga. Kerendahan hati dalam musyawarah mendorong kerjasama dan mengurangi konflik. Dengan sikap ini, setiap peserta musyawarah lebih fokus pada mencari solusi bersama daripada memenangkan argumen pribadi (Lubis, 2019).

Keterbukaan mengacu pada transparansi dan kejujuran dalam berbagi informasi dan pandangan. Ini berarti bersikap jujur dan terbuka mengenai pemikiran dan perasaan sendiri, serta siap menerima umpan balik dari orang lain. Keterbukaan memungkinkan diskusi yang jujur dan efektif dalam musyawarah. Tanpa keterbukaan, musyawarah cenderung menjadi tidak efektif karena informasi penting mungkin tidak dibagikan atau dipertimbangkan dengan benar. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya musyawarah dalam kehidupan. Misalnya, dalam Surah Ash-Shura (42:38), Allah berfirman yang artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat diatas menjelaskan bahwa: Bagi orang-orang beriman akan merespons panggilan Allah untuk bertauhid (menyembah Allah semata) dan menaati perintah-Nya. Tauhid adalah inti dari iman Islam, yang menegaskan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Mereka melaksanakan shalat lima waktu dengan tepat

waktu dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan. Shalat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Sebelum melakukan sesuatu, mereka bermusyawarah atau berdiskusi dengan orang lain untuk mencari pendapat dan nasihat. Ini menunjukkan sikap bijaksana dan menghargai pandangan orang lain, serta pentingnya membuat keputusan secara kolektif (Al-Maraghi, 1987).

Memberikan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka untuk kepentingan di jalan Allah. Ini bisa berupa sedekah, zakat, dan bentuk-bentuk infak lainnya. Sedekah dan infak adalah wujud kepedulian sosial dan bentuk pengabdian kepada Allah dengan membantu mereka yang membutuhkan. Mereka memastikan untuk menunaikan hak-hak yang harus diberikan kepada orang lain. Ini termasuk memberikan zakat (kewajiban finansial untuk membantu yang membutuhkan), nafkah kepada keluarga, dan bentuk-bentuk infak lainnya. Menunaikan hak-hak ini menunjukkan tanggung jawab sosial dan moral dalam Islam. Ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Mereka tidak hanya beribadah kepada Allah dengan shalat dan tauhid, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dengan bermusyawarah, bersedekah, dan menunaikan hak-hak orang lain.

Firman Allah ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah metode yang diharapkan untuk digunakan oleh umat dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip kelapangan dada, kerendahan hati, dan keterbukaan adalah esensial untuk menjalankan musyawarah dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Allamah Sayyid Abdullah al-Haddad mengingatkan pentingnya musyawarah dan istikharah sebelum membuat keputusan dalam urusan-urusan penting, seperti bepergian jauh, mencari jodoh (menikah), dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab beliau berjudul *Risâlatul Mu'âwanah wal Mudhâharah wal Muwâzarah* (Dar Al-Hawi, 1994, hal. 114) yang artinya: "Tidak akan gagal siapapun yang melakukan istijharah dan tidak akan menyesal siapa saja yang suka bermusyawarah."

Dari kutipan tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, dalam urusan-

urusan penting yang menyangkut keselamatan jiwa, masa depan, dan sebagainya, seperti bepergian jauh, mencari pekerjaan, atau mencari jodoh (menikah), kita tidak sebaiknya membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan orang-orang dekat kita, seperti sanak saudara atau orang-orang dekat seperti teman-teman dan para guru. Hal ini karena sebagai makhluk sosial kita tidak sebaiknya mengabaikan keterkaitan kita dengan mereka. Ketika kita hendak menempuh perjalanan jauh ke luar pulau atau bahkan ke luar negeri dengan tujuan mencari pekerjaan atau berdakwah, misalnya, masukan-masukan dari orang-orang dekat kita yang memang memiliki kapasitas keilmuan atau pengalaman, baik yang setuju maupun tidak setuju, perlu dipertimbangkan. Hal ini karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam banyak hal dalam menatap masa depan sehingga memerlukan bantuan apapun wujudnya dari orang lain.

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Ali 'Imran: 159 yang artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat diatas menjelaskan bahwa: Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Rahmat ini berupa kelembutan hati dan perilaku yang baik dari Nabi terhadap para sahabat. Kelembutan dan perilaku baik Nabi terhadap para sahabat adalah karunia dari Allah. Jika Nabi berperilaku buruk dan berhati keras, para sahabat pasti akan menjauh darinya. Ini menunjukkan pentingnya sifat kelembutan dan kasih sayang dalam memimpin dan berinteraksi dengan orang lain. Allah meminta Nabi untuk tidak menghukum para sahabat atas kesalahan yang mereka buat pada Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran di mana kaum Muslimin mengalami kekalahan, sebagian karena ketidaktaatan beberapa sahabat terhadap perintah Nabi. Allah memerintahkan Nabi untuk memohonkan ampunan bagi mereka, menunjukkan

pentingnya pengampunan dan kasih sayang dalam menghadapi kesalahan orang lain. (Al-Maraghi, 1987).

Allah memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam perkara-perkara yang membutuhkan musyawarah. Ini menekankan pentingnya berkonsultasi dan meminta pendapat orang lain dalam pengambilan keputusan, yang merupakan bagian dari kepemimpinan yang bijaksana dan inklusif. Setelah bermusyawarah dan membuat keputusan, Allah memerintahkan Nabi untuk menjalankan keputusan tersebut dengan tekad yang bulat dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah setelah melakukan segala usaha yang maksimal. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya, yaitu mereka yang berserah diri kepada kehendak Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Ini mengajarkan bahwa tawakal adalah bagian penting dari iman dan menunjukkan kepercayaan penuh kepada Allah.

Ayat tersebut, meskipun secara langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw., menekankan pentingnya musyawarah dalam memutuskan berbagai persoalan. Nabi Muhammad diminta untuk berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya atau anggota masyarakat untuk mencapai keputusan terbaik. Ini menekankan bahwa meskipun Nabi Muhammad Saw. adalah seorang Rasul dengan wahyu langsung dari Allah, tetap penting untuk melakukan musyawarah dalam beberapa persoalan, menunjukkan kerendahan hati dan keterbukaan dalam kepemimpinan.

Meskipun ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw., ia juga berfungsi sebagai petunjuk umum bagi seluruh umat Islam. Ayat tersebut memberikan pedoman bagi setiap muslim tentang pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini memberikan petunjuk khusus kepada para pemimpin untuk bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang baik sering kali merupakan hasil dari diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai sudut pandang.

Para pemimpin dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan partisipatif dalam memimpin. Ini berarti melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil

mencerminkan kepentingan dan aspirasi semua pihak yang terlibat. Dengan bermusyawarah, para pemimpin dapat membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati dengan anggota-anggotanya. Ini juga meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil karena didasarkan pada proses yang inklusif dan transparan.

Musyawarah bukan hanya praktik yang dianjurkan dalam konteks kepemimpinan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap muslim diharapkan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, maupun organisasi. Praktik musyawarah sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keterbukaan, dan kerendahan hati. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara adil dan mempertimbangkan pandangan semua pihak yang terlibat.

Konsep syura atau musyawarah yang efektif hanya dapat terwujud jika semua peserta memiliki sikap kelapangan dada, kerendahan hati, dan keterbukaan. Sikap-sikap ini memungkinkan proses musyawarah yang adil, inklusif, dan konstruktif, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam firman Allah. Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Siyasah Dusturiyah adalah dengan melibatkan prinsip-prinsip demokrasi dan at-Tasyawur/as-Syura (musyawarah) yang sesuai dengan ajaran Islam dan sistem konstitusional yang ada, seperti dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta konstitusi negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran skripsi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 adalah dengan cara menerapkan pendidikan berdemokrasi di sekolah melalui pemilihan ketua kelas dan Presiden Pelajar secara langsung. Para guru menggunakan metode diskusi dan *musyawarah* dalam

pembelajaran, yang dengan berdiskusi dan bermusyawarah dapat mengembangkan karakter demokratis.

2. Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* adalah dengan melibatkan prinsip-prinsip demokrasi dan *at-Tasyawur/as-Syura* (*musyawarah*) yang sesuai dengan ajaran Islam dan sistem konstitusional yang ada, seperti dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta konstitusi negara.

3.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Penerapan Pancasila Sila Keempat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan *Siyasah Dusturiyah*, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Pancasila Sila Keempat adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki kebebasan berpendapat karena kedaulatan ada ditangan rakyat. Namun, dukungan dari masyarakat, baik secara kelompok maupun individu, tetap diperlukan, seperti yang telah dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun.
2. Dan bagi penelti berikutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan dan memper-tajam lagi hasil penelitian yang sudah ada.

DAFTAR RUJUKAN

A. Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah* (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah), Jakarta: Prenada Media

Abdussamad, J. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 73-82.
<https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.6>

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Jakarta

Amany Burhanuddin, U. L. (2005). Kitābat al-Baḥṡ al-ʿIlmī fī al-Siyāsah al-Sharʿiyyah Kḥiṭṭah wa Ṣiyāḡah. *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 4(2).
<https://www.proquest.com/docview/2695587740/12E2AC4DF774331PQ/14?accoun>

tid=33171&sourcetype=Scholarly%20Journals

Ana Rodhatul Jannah (2022), Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Auliadin, A. et. al. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(5), 1641-1648.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36003>

Fachrudin, R. (2015). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-12.
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/112/147>

Fawziyah 2019 *Konsepsi Dan Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Islam*. Jurnal Diklat teknis. Volume: VII No. 1.

Feny, Rita, F. et. al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif [edisi revisi]*. Global Eksekutif Teknologi. Jakarta

Grădinaru, G. I., Dinu, V., Rotaru, C. L., & Toma, A. (2024). *The Development of Educational Competences for Romanian Students in the Context of the Evolution of Data Science and Artificial Intelligence*. *Amfiteatru Economic*, 26(65), 14-32.
<https://www.proquest.com/docview/3015084948/B7017B49D0684CE1PQ/1?accountid=33171&sourcetype=Scholarly%20Journals>

Hedger, M. D. (2021). *The Impact of Spiritual Leadership on the Leadership Practices of Public School Superintendents*. Lindenwood University, School of Education
<https://www.proquest.com/dissertations-theses/impact-spiritual-leadership-on-practices-public>.

- Halim, A. (2022). Redesigning consolidated data for handling extreme poverty in rural areas based on SDGs Desa. *Journal of Community Positive Practices*, XXII(1), 60–76.
- Halim, Abdul; Nawawi; Abdurrazaq, Kholish. 2007. Al-Zaytun International Education Center, Profile 2007. Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia.
- Hasan, M. et. al. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group. Surakarta
- Khoiron. (2017). Pelayanan Publik dan Keadilan Sosial. PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Volume 2, Nomor 1, April <https://www.proquest.com/scholarly-journals/pelayanan-publik-dan-keadilan-sosial/docview/2253366120/se-2?accountid=215586>, 10.
- Kurniadi, G. R., Mulki, G. Z., & Priadi, E. (2017). Strategi Pengembangan Prasarana Permukiman Di Jagoi Babang Sebagai Penunjang Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Teknik Sipil*, 17(2). <https://doi.org/10.26418/jtsft.v17i2.23879>
- Lilik Hidayat et.al (2017), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 3 No. 3 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada siswa MAN 1 Buleleng Tahun Ajaran 2016/2017. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/20803>
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*. Semesta Aksara. Yogyakarta
- M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur'an (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 9.
- Mena-Guacas, A. F. et al. (2023). Collaborative learning and skill development for educational growth of artificial intelligence: A systematic review. *Contemporary Educational Technology*, 15(3). <https://www.proquest.com/docview/3014034083/CF1F5DA3BBCF4F0BPQ/1?accountid=33171&sourcetype=Scholarly%20Journals>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif [edisi revisi]*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2015. *at-Ta'liq ala Siyasah asy-Syar'iiyyah fi Ishlah arRa'iiyyah li Syaikh al-Islam Ibnu Taiyimah*, ter, Ajmal Arif, Politik Islam: *Ta' liq Siyasah Syar'iiyyah Ibnu Taimiyyah*, Jakarta: Griya Ilmu.
- Muhammad Anwar Rube'I (2019), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 2. Implementasi Sila Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan pada Mahasiswa Program Studi PPKN IKIP PGRI Pontianak. <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/61-71>
- Nurhayani. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. In *Science*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
- Nurjamillah, I., Rohmah, S. N., Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih Siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 10 (4), 1191-1208.
- Partini, D., & Hidayat, A. N. (2024). Disaster risk reduction efforts through education in Indonesia: A literature review. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*, 1314(1), 012049. <https://www.proquest.com/docview/2967210096/E4B5251DAC14487FPQ/3?accountid=33171&sourcetype=Scholarly%20Journals>
- Prawoto, I., Rohmah, S. N., & Sunarya, F. R. (2020). *Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan, Penyebaran Strategi Syaykh Al-Zaytun Di Al-zaytun Kontribusinya Terhadap Masyarakat*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15571>
- Rahim, A. et. al. (2024a). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan

- Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2015. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(8), 318–335.
- Rahim, A. et. al. (2024b). PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2015 DI MA'HAD AL-ZAYTUN. *JABB*, 14(1), 5–24.
- Rahim, A. et al. (2024c). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2872–2877.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4108>
- Rohmah, S., Sukemi, Suniyati, & Setiabudi, D. I. (2023). PERAN PENDIDIKAN DI MAHAD AL-ZAYTUN DALAM MEMPERKUAT PERADABAN ISLAM. 7693, 1–6.
- Samsudin, N. H. (2018). Keadilan Dalam Kepimpinan Sebagai Faktor Motivasi Pekerja. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* (Special Issue: Islamic Jurisprudence in Contemporary Society) <https://www.proquest.com/scholarly-journals/keadilan-dalam-kepimpinan-sebagai-faktor-motivasi/docview/2437115568/se-2?accountid=215586>, 161–170.
- Simanullang, C. R. (2015). Al-Zaytun sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. In *Pustaka Tokoh Indonesia* (Vol. 70076). Pustaka Tokoh Indonesia.
- Sufri L Batan, et.al (2021), Jurnal Kajian dan Pembelajaran Indonesia Vol. 1 No. 1, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al Munawwaroh Malang. <https://journal.actual-insight.com/index.php/pelita/article/view/108>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Susanto., Rahim, A. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyasa; Studi Kasus Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. *Journal of Legal Research*. Vol 3, No 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/document/s/detail/2218754>
- Susilawati, D. (2021). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Golkar dan Nasdem di Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasa Dusturiyah)*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare.
- Suyahmo (2015), *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol 32, No 1, Model Implementasi Sila Ke 4 “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” <https://journal.unnes.ac.id/nju/JPP/article/view/5707>
- Thaib, R. M., & Siswanto, I. (2015). Inovasi Kurikulum dalam Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif). *Jurnal Edukasi*, 1(2), 216–228.
- Yohana R.U. Sianturi dan Dinie Anggraeni Dewi (2021), *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 1, Penerapan Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari Hari dan Sebagai Pendidikan Karakter. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1452>